

## **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen**

**Yulens Frits Bonai, Syaikhul Falah, Sylvia Christina Daat**

[yulensbonai30@gmail.com](mailto:yulensbonai30@gmail.com) [sehufallah@gmail.com](mailto:sehufallah@gmail.com) [sylviadaat@gmail.com](mailto:sylviadaat@gmail.com)

*Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih*

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of Human Resource Capacity and the Internal Auditor's Role on the Quality of Local Government Financial Reports. The study was located in Waropen Regency with a total of 34 respondents, who work in the field of finance and accounting, which is related to the preparation of financial statement. The SPSS application was used as an analytical tool, and causality type of research was used to test the effect of independent variables on dependent so that the assessment uses Multiple Regression Analysis. The result of this study indicate that the capacity of human resources and the role of internal auditors simultaneously influence the Quality of Waropen District Financial Reports. In addition, from the partial influence of the Capacity of Human Resources to have a positive effect on the Quality of Financial Statements. While the role of internal auditors does not affect the Quality of Financial Statements.*

**Keywords :** *Human Resource Capacity, Internal Auditor Role and Quality of Financial Reports*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Penelitian**

Pelaporan keuangan sektor publik khususnya laporan keuangan pemerintah adalah wujud dan realisasi pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang transparan untuk pencapaian *good governance*. Upaya pemerintah untuk mewujudkan *good government governance* sejak tahun 2003 telah mengeluarkan undang-undang pengelolaan keuangan Negara yang meliputi UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Bentuk pertanggungjawaban keuangan Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyajikan laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu, masih banyak terdapat penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Pasal 33 pada UU No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila pemerintah daerah belum menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk APBD (Hullah, dkk., 2012:9-10).

Jika bicara mengenai laporan keuangan dan kualitas yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah, maka secara otomatis akan menimbulkan pertanyaan apakah pelaporan keuangan pemerintah selama ini sudah memenuhi kriteria kualitas informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan? Apakah laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (UU No 17 Tahun 2003) telah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Dukungan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut (Winidyaningrum, 2010).

Kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu.

Auditor internal pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Peranan auditor internal pemerintah didorong untuk membantu Kepala Daerah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima secara umum (Indra Bastian, 2014: 36).

Banyak pihak dewasa ini semakin mengandalkan peran auditor internal dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan *good governance*. Telah banyak peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun internasional yang mencerminkan kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap peran audit internal dan sistem pengendalian intern dalam menjaga efektivitas organisasi, terutama untuk menghindari krisis serta kegagalan organisasi (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004:3).

Permasalahannya adalah auditor sebagai pengawas internal apakah sudah memiliki kemampuan untuk mewujudkan perannya secara efektif dalam mewujudkan hasil audit berkualitas. Hasil audit yang berkualitas diharapkan dapat menciptakan perbaikan-perbaikan yang dilakukan audit di periode selanjutnya. Perbaikan tersebut sangat terkait dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor/pemeriksa. Dengan kata lain, laporan hasil audit yang berkualitas jika hasil audit yang dapat ditindaklanjuti oleh audit. Namun fenomena yang terjadi saat ini, auditor internal belumlah berperan efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kualitas audit internal pemerintah daerah masih

menjadi sorotan berbagai pihak masyarakat. Hal ini dikarenakan masih kurangnya transparansi temuan audit yang terdeteksi oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat terdeteksi secara lengkap. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Peran Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Kapasitas Sumber Daya Manusia dan antara Peran Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan?

## KAJIAN PUSTAKA

### *Agency Theory*

Menurut (Mardiasmo, 2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas public sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan.

Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (faristina, 2011).

### **Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi selain berfungsi sebagai perencana tugas-tugas organisasi maupun sasaran yang ingin dicapai, juga berperan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Secara umum, sumber daya yang terdapat dalam organisasi dapat dikelompokkan atas dua macam, yaitu sumber daya manusia (*human resources*), dan sumber daya non-manusia (*non-humanresources*) yang meliputi modal, mesin, teknologi, bahan-bahan (*material*), dan lain sebagainya (Wijaya, 2012:65). Dari berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, sumberdaya manusia menempati posisi yang strategis diantara sumber daya lainnya. Sumberdaya manusia merupakan asset kritis organisasi yang tidak hanya diikutsertakan dalam filosofi organisasi melainkan juga dalam proses perencanaan strategis. Menurut Kathrin Connor (Ellitan, 2002:66-67) sumber daya manusia diartikan sebagai berikut:

*Human resources are a part of the strategic planning process. It is a part of policy development, line extension planning and the merger and acquisition processes. Little is done in planning policy on the finalizing stages of any deal.*

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa SDM merupakan bagian proses perencanaan strategis dan menjadi bagian pengembangan kebijaksanaan organisasi, perencanaan perluasan lini organisasi, proses merger dan akuisisi organisasi. Hanya sebagian kecil saja hal-hal

yang dilakukan organisasi tanpa melibatkan sumber daya manusia dalam membuat perencanaan, kebijaksanaan, dan pembentukan strategi organisasi. Apabila organisasi melakukan perencanaan strategis, manajer lini lebih berkemungkinan melihat sifat-sifat penting isu-isu sumberdaya manusia yang ada (Ellitan, 2002:67).

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya adalah kompeten, yang berarti cakap, mampu atau terampil. Pada konteks manajemen sumber daya manusia, istilah kompetensi mengacu pada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaan. McClelland mengartikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik (Sedarmayanti, 2013:126). Mitrani, et.al., Specer & Spencer (dalam Adriana, dkk., 2010:44) mengemukakan bahwa kompetensi adalah:

*Underlying characteristic's of an individual which is causally related to criterion-referenced effective and or superior performance in a job or situation.*

Berdasarkan hal tersebut, maka kompetensi diartikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Kompetensi seorang individu merupakan sesuatu yang melekat dalam dirinya yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kinerjanya. Sesuatu yang dimaksud tersebut dapat menyangkut motif, konsep diri, sifat, pengetahuan, maupun kemampuan/ keahlian (Adriana, dkk., 2010:44).

Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*), dan hasil-hasil (*outcomes*). Sumber daya manusia mencakup tiga aspek yaitu (Hullah dkk., 2012:10) Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan.

### **Peran Auditor Internal**

Dewasa ini peran auditor internal dirasakan semakin penting oleh organisasi perusahaan. Menjadi sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mempunyai tim spesialis yang menelaah prosedur-prosedur dan operasi dari berbagai unit dan melaporkan ketidaktaatan suatu tindakan, inefisiensi, dan tidak adanya kendali jelas bahwa tugas itu tidak dapat dibebani pada auditor eksternal yang tujuan utamanya adalah menilai apakah laporan keuangan mencerminkan secara wajar hasil - hasil usaha serta kondisi keuangan usaha suatu perusahaan. Karena itu audit internal telah menjadi suatu pemberian jasa yang tidak hanya memiliki keahlian akuntansi tetapi juga keahlian dalam perilaku organisasi atau perusahaan dan bidang-bidang fungsional lainnya. Peran Auditor Internal menurut Tampubolon sebagai berikut (dalam jurnal Periantinah & Adhistry, 2012:38-39):

- a. Peran auditor internal sebagai pengawas
- b. Peran auditor internal sebagai konsultan.
- c. Peran auditor internal sebagai katalisator.

### **Kualitas Laporan Keuangan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan (Aliyah dan Nahar, 2012:138):

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Astuti (2007:27) mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah potret implementasi pertanggungjawaban perusahaan kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas laporan keuangan tersebut. Pelaporan keuangan juga membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, dan keterbatasan kemampuan untuk memperoleh informasi. Oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting.

Karakteristik laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, terdapat empat karakteristik laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat karakteristik tersebut adalah:

1. Relevan. Informasi yang relevan adalah memiliki manfaat umpan balik, Memiliki manfaat prediktif, Tepat waktu dan Lengkap.
2. Andal. Karakteristik informasi yang andal adalah Penyajian jujur, Dapat diverifikasi dan Netralitas.
3. Dapat dibandingkan.
4. Dapat dipahami.

Sedangkan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 terdapat delapan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan. Kedelapan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Basis akuntansi.
- 2) Nilai historis.
- 3) Realisasi.
- 4) Substansi mengungguli bentuk formal.
- 5) Periodisitas.
- 6) Konsistensi.
- 7) Pengungkapan lengkap.
- 8) Penyajian wajar.

## Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Komarasari, Warih (2017) menguji Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Susanti, Fitri (2017) yang menguji Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin, Akhmad (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas LKPD, Peran Internal Audit memiliki efek positif yang tidak signifikan terhadap kualitas LKPD, SPIP memiliki efek positif yang signifikan terhadap kualitas LKPD, HR Kompetensi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap SPIP, Peran Audit Internal efek positif yang signifikan pada SPIP, Kompetensi SDM yang dimediasi oleh SPIP efek positif yang tidak signifikan terhadap kualitas LKPD. Peran Audit Internal yaitu SPIP yang dimediasi memiliki efek positif yang tidak signifikan terhadap kualitas LKPD.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) menguji Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa Kapasitas SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD, Pemanfaatan TI berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD. Sedangkan SPIP berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD.

## Pengembangan Hipotesis

### **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kabupaten Waropen**

SDM merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompentensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011). Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah kualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Wati (2014), yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Jika tinggi kapasitas sumber daya manusia, maka kualitas laporan keuangan semakin tinggi.

## **H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.**

### **Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kabupaten Waropen**

Audit Internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen didalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan. Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi.

Audit Internal merupakan suatu fungsi yang ada dalam suatu organisasi yang berperan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan atau aktivitas atau program di dalam organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomisnya kegiatan/aktivitas/program. Internal audit di Pemerintahan Daerah, dalam hal ini adalah Inspektorat daerah memiliki peran sangat penting, yaitu sebagai pengawas intern.

## **H2: Peran Auditor Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

### **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kabupaten Waropen**

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman dibidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Selain itu, dengan adanya kompetensi staf akuntansi yang memadai memungkinkan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas karena disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. (Sari, 2014)

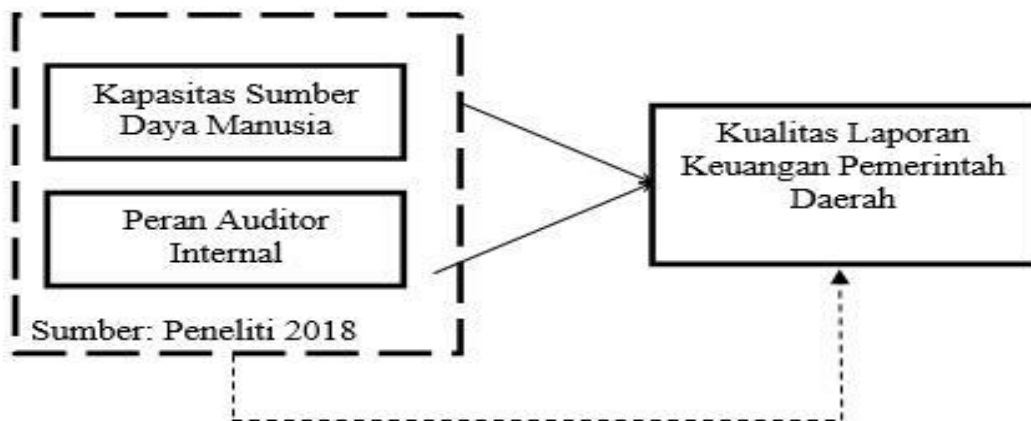
Selain itu, peran auditor internal pemerintah/Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi -fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuannya. Sehingga dengan adanya pengawasan intern tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **H3: Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

## Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu kapasitas sumber daya manusia, dan peran auditor Internal. Model penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Model Penelitian**



## METODOLOGI PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil lokasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Waropen sebagai objek penelitian.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah seluruh Dinas dengan unit analisis pegawai Kasubag Keuangan/bendahara di setiap Dinas. Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*.

### Definisi Operasional Variabel

#### Variabel Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kompetensi sumber daya manusia dan peran auditor internal sedang variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan.

#### 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.



## 2. Peran Auditor Internal

Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang cocok digunakan jika jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas (Sugiyono, 2010:199).

### Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel terikat, bila dua atau lebih variabel bebas sebagai prediktor dimanipulasi (dinaik-turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan jika jumlah variabel bebasnya minimal dua. Rumus regresi berganda adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2010:277):

Di mana:

- $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$
- Y = variabel Kualitas Laporan Keuangan
  - a = konstanta, nilai Y apabila  $X = 0$
  - b = koefisien regresi linear berganda
  - X1 = variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia
  - X2 = variabel Peran Auditor Internal

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Validitas merupakan derajat hingga sejauh mana ketepatan dan ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur gejala (Sastradipoera, 2005). Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian berperilaku mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah (Harrison, dalam Zulganef, 2006).

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2001). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2005). Untuk menguji model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik yang bersangkutan.

##### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2005).

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

### Uji Hipotesis

#### Uji Statistik t (Pengujian Secara Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

#### Uji Simultan (F)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan sudah fix atau tidak. Dengan menggunakan uji F, yaitu dengan memperhatikan signifikansi nilai F pada output perhitungan dengan tingkat  $\alpha$  5%. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5 % maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi / R<sup>2</sup> pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2007). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) berarti semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengumpulan Data

Hasil dari studi lapangan yang dilakukan pada pemerintahan Kabupaten Waropen dengan menyebarkan kuesioner secara langsung pada masing-masing OPD. Kuesioner disebarkan dengan cara mengantar langsung kepada responden. Kuesioner yang telah disebarkan berjumlah 55 kuesioner dan yang dikembalikan sejumlah 34 terdapat sedangkan sebanyak 21 kuesioner tidak kembali, sehingga tingkat pengembaliannya sebesar (62%). Berikut nama-nama instansi yang mengembalikan kuesioner yang dibagikan pada Pemerintah Kabupaten Waropen:

**Tabel 1. Nama Instansi yang Mengembalikan Kuesioner**

No	Nama Instansi	Jumlah
1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi	2
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
3	BPKAD	1

4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3
5	Dinas Kesehatan	3
6	Dinas P2K	1
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4
8	Dinas Pendidikan	1
9	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup	2
10	Dinas Perikanan	2
11	Dinas Perindakop UKM dan Transportasi	1
12	Dinas Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	1
13	Dinas Pekerjaan Umum	1
14	Dinas Sosial	4
15	Inspektorat	3
16	SATPOL PP	1
17	Sekretariat Daerah	1
	Total	34

*Sumber: Data diolah Penulis, 2018*

Selain hasil pengumpulan data yang dilihat dari penyebaran kuesioner, berikut ini sejumlah data responden yang dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin (JK) terhadap usia responden, tingkat pendidikan (TP) dan lama menjabat (LM) yang tercantum didalam beberapa tabel, sebagai berikut:

**Tabel 2. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Terhadap Pendidikan**

Count		JK * PENDIDIKAN Crosstabulation			
		PENDIDIKAN			Total
		SLTA	S1	S2	
JK	PEREMPUAN	0	13	0	13
	LAKI-LAKI	2	17	2	21
Total		2	30	2	34

*Sumber: Data diolah SPSS, 2018*

Berdasarkan Tabel 2 diatas, data responden yang terkumpul sebanyak 34 responden, terdiri atas 21 yang berjenis kelamin laki-laki dan 13 yang berjenis kelamin perempuan, sehingga ini dapat diartikan bahwa pegawai Pemerintah Kabupaten Waropen disetiap SKPD mayoritas yang bekerja adalah pegawai berjenis kelamin laki-laki. Dari hasil tersebut dapat pula dilihat data responden berdasarkan jenis kelamin terhadap latar pendidikan. Data yang diperoleh adalah untuk pendidikan SLTA terdiri atas 2 laki-laki dan 0 perempuan dengan total 2 orang, untuk pendidikan S1 terdiri atas 17 laki-laki dan 13 perempuan dengan total 30 orang, untuk pendidikan S2 terdiri atas 2 laki-laki dan 0 perempuan dengan total 2 orang, sehingga dapat diartikan bahwa pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen yang bekerja lebih banyak terdapat pegawai yang berlatar belakang pendidikan S1 (Sarjana).

**Tabel 3. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Terhadap Usia**

JK * USIA Crosstabulation						
Count						
		USIA				Total
		25-35	35-45	51-55	56-60	
JK	PEREMPUAN	1	6	4	2	13
	LAKI-LAKI	1	11	6	3	21
Total		2	17	10	5	34

*Sumber: Data diolah SPSS, 2018*

Berdasarkan isi Tabel 3 di atas, data responden yang terkumpul sebanyak 34 responden, terdiri atas 21 yang berjenis kelamin laki-laki dan 13 yang berjenis kelamin perempuan, sehingga ini dapat diartikan bahwa pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen mayoritas yang bekerja adalah pegawai berjenis kelamin laki-laki. Dari hasil tersebut dapat pula dilihat data responden berdasarkan jenis kelamin terhadap usia. Data yang diperoleh adalah untuk tingkat usia 25-35 terdiri atas 1 laki-laki dan 1 perempuan dengan total 2 orang, untuk usia 35-45 terdiri atas 11 laki-laki dan 6 perempuan, untuk usia 51-55 terdiri atas 6 laki-laki dan 6 perempuan dengan total 10 orang, dan untuk usia 56-60 terdiri atas 3 laki-laki dan 2 perempuan dengan total 5 orang, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa para pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen yang bekerja lebih didominasi dengan pegawai yang berusia 35-45 tahun.

**Tabel 4. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Terhadap Lama Menjabat**

JK * LAMAMENJABAT Crosstabulation				
Count				
		LAMA MENJABAT		Total
		1-5 TAHUN	6-10 TAHUN	
JK	PEREMPUAN	11	2	13
	LAKI-LAKI	14	7	21
Total		25	9	34

*Sumber: Data diolah SPSS, 2018*

Berdasarkan isi Tabel 4 di atas, data responden yang terkumpul sebanyak 34 responden, terdiri atas 21 yang berjenis kelamin laki-laki dan 13 yang berjenis kelamin perempuan, sehingga ini dapat diartikan bahwa pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen di setiap SKPD mayoritas yang bekerja adalah pegawai berjenis kelamin laki-laki. Dari hasil tersebut dapat pula dilihat data responden berdasarkan jenis kelamin terhadap masa kerjanya. Data yang diperoleh adalah untuk masa kerja 1-5 tahun terdiri atas 14 laki-laki dan 11 perempuan dengan total 25 orang, untuk masa kerja 6-10 tahun terdiri atas 7 laki-laki dan 2 perempuan dengan total 9 orang, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa para pegawai Pemerintah Daerah kabupaten yang bekerja lebih didominasi pegawai telah bekerja selama 1-5 tahun di Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen.

## Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi masing-masing variabel yang digunakan. Pengolahan data ini menggunakan program SPSS versi 16.00. Berikut adalah hasil statistik deskriptif yang dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Rentang	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TKL	34	10-50	24.00	49.00	40.0294	4.75768
TKSDM	34	9-45	23.00	39.00	31.3288	3,57371
TPAI	34	8-40	17.00	39.00	31.5000	4.41245
Valid N (listwise)	34					

Sumber: Data diolah SPSS, 2018.

Hasil statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 5 yang merupakan hasil pengukuran deskriptif masing-masing variabel dari 34 data pengamatan, menunjukkan rentang skala teoritis dari nilai *minimum* dan *maximum*, kemudian hasil nilai rata-rata (*mean*) serta nilai dari standar deviasinya.

Variabel Kualitas Laporan Keuangan menggunakan 10 item pertanyaan dan rentang teoritis yang ada sebesar 10-50. Dari Tabel 4.5 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 24 dan nilai *maximum* sebesar 49. Adapun juga nilai rata-rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 40,02 dan standar deviasinya sebesar 4,75.

Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia menggunakan 9 item pertanyaan yang awalnya 14 item karena pertanyaan tersebut tidak valid sehingga dihapus 5 pertanyaan sebelumnya dan rentang teoritis yang ada sebesar 9- 45. Dari Tabel 4.5 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 23 dan nilai *maximum* sebesar 39. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 31,3 dan standar deviasinya sebesar 3,573.

Variabel Peran Audit Intern menggunakan 8 item pertanyaan dan rentang teoritis yang ada sebesar 8-40. Dari Tabel 4.5 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 17 dan nilai *maximum* sebesar 39. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 31,5 dan standar deviasinya sebesar 4,41.

## Hasil Uji Kualitas Data

### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2007:45). Untuk itu perlu dilakukan uji validitas dalam mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Correlated Item – Total Correlation* dengan kriteria sebagai berikut : jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel atau signifikan di bawah 0,05 maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan *valid*.

**Tabel 6. Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan**

KL	R Hitung	Signifikan	Keterangan
X1.1	0,272	0,119	Tidak Valid
X1.2	0,522	0,002	Valid
X1.3	0,687	0,000	Valid
X1.4	0,615	0,000	Valid
X1.5	0,640	0,000	Valid
X1.6	0,593	0,000	Valid
X1.7	0,391	0,022	Valid
X1.8	0,587	0,000	Valid
X1.9	0,820	0,000	Valid
X1.10	0,504	0,000	Valid

*Sumber: Data diolah SPSS, 2018*

Berdasarkan dari Tabel 6 diatas, terdapat satu item pertanyaan yang tidak valid yaitu pada X1.1 sehingga item tersebut akan dihapus dari daftar pertanyaan penelitian dan setelah itu akan dilakukan pengujian validitas kembali untuk variable kualitas laporan keuangan.

**Tabel 7. Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan (Hapus X1.1)**

KL	R Hitung	Signifikan	Keterangan
Y	0,455	0,007	Valid
Y	0,618	0,000	Valid
Y	0,617	0,000	Valid
Y	0,665	0,000	Valid
Y	0,643	0,000	Valid
Y	0,428	0,000	Valid
Y	0,623	0,000	Valid
Y	0,842	0,000	Valid
Y	0,535	0,001	Valid

*Sumber: Data diolah SPSS, 2018*

Maka dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan dari variabel Kualitas Laporan Keuangan (KL) memiliki nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel (0,286) atau signifikan  $0,00 < 0,05$ , sehingga instrumen untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan (KL) di dalam penelitian ini dapat dinyatakan *valid*.

**Tabel 8. Uji Validitas Kapasitas Sumber Daya Manusia**

KPSDM	R Hitung	Signifikan	Keterangan
X1.1	0,138	0,438	Tidak Valid
X1.2	0,622	0,000	Valid
X1.3	0,545	0,000	Valid
X1.4	0,572	0,000	Valid
X1.5	0,588	0,000	Valid
X1.6	0,655	0,000	Valid
X1.7	0,530	0,000	Valid
X1.8	0,387	0,000	Valid
X1.9	0,402	0,000	Valid
X1.10	0,355	0,399	Tidak Valid
X1.11	0,200	0,084	Tidak Valid
X1.12	0,236	0,240	Tidak Valid
X1.13	0,262	0,078	Tidak Valid
X1.14	0,244	0,224	Tidak Valid

*Sumber: Data diolah SPSS, 2018*

Berdasarkan dari Tabel 4.8 diatas, terdapat beberapa item pertanyaan yang tidak valid yaitu pada X2.1, X2.10, X2.11, X2.13 dan X2.14 sehingga item tersebut akan dihapus dari daftar pertanyaan penelitian dan setelah itu akan dilakukan pengujian validitas kembali untuk variabel kualitas laporan keuangan.

**Tabel 9. Uji Validitas Kapasitas Sumber Daya Manusia**

KPSDM	R Hitung	Signifikan	Keterangan
X1.2	0,622	0,000	Valid
X1.3	0,546	0,000	Valid
X1.4	0,572	0,000	Valid
X1.5	0,588	0,000	Valid
X1.6	0,659	0,000	Valid
X1.7	0,530	0,000	Valid
X1.8	0,389	0,000	Valid
X1.9	0,403	0,000	Valid

*Sumber: Data diolah SPSS, 2018*

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan dari variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (KPSDM) memiliki nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel (0,286) atau signifikan  $0,00 < 0,05$ , sehingga instrumen untuk variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (KPSDM) di dalam penelitian ini dapat dinyatakan *valid*.

**Tabel 10. Uji Validitas Peran Auditor Internal**

PAI	R Hitung	Signifikan	Keterangan
X1.1	0,569	0,000	Valid
X1.2	0,643	0,000	Valid
X1.3	0,737	0,000	Valid
X1.4	0,792	0,000	Valid
X1.5	0,774	0,000	Valid
X1.6	0,703	0,000	Valid
X1.7	0,537	0,000	Valid
X1.8	0,415	0,000	Valid

*Sumber: Data diolah SPSS, 2018*

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan dari variabel peran auditor internal (PAI) memiliki nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel (0,286) atau signifikan  $0,00 < 0,05$ , sehingga instrumen untuk variabel peran auditor internal (PAI) di dalam penelitian ini dapat dinyatakan *valid*.

### Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha*. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki *cronbach alpha* lebih dari 0,6 (Ghozali, 2011). Hasil pengolahan SPSS untuk uji reliabilitas menunjukkan *Cronbach's Alpha* untuk semua pertanyaan variabel Kualitas Laporan Keuangan, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan peran auditor internal  $> 0,6$  yaitu nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel sebesar 0,781, 0,741, 0,801  $> 0,6$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel independen dan dependen di dalam penelitian ini bersifat *reliabel*.

### Uji Asumsi Klasik

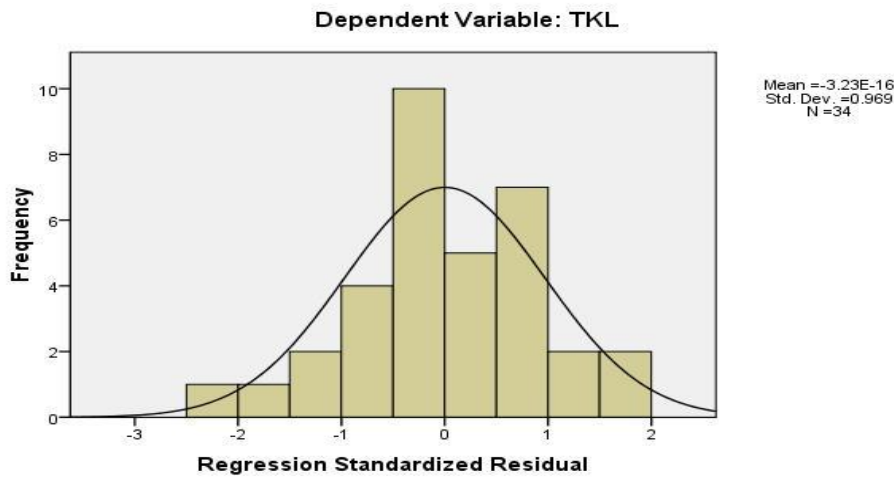
#### Uji Normalitas

Uji normalitas pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya telah terdistribusi secara normal atau tidak. Suatu model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian ini dapat dilakukan dengan dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali I. , 2016). Berikut ini adalah hasil uji normalitas dengan analisis grafik dengan melihat histogram dan *normal probability plot*. Apabila *ploting* data



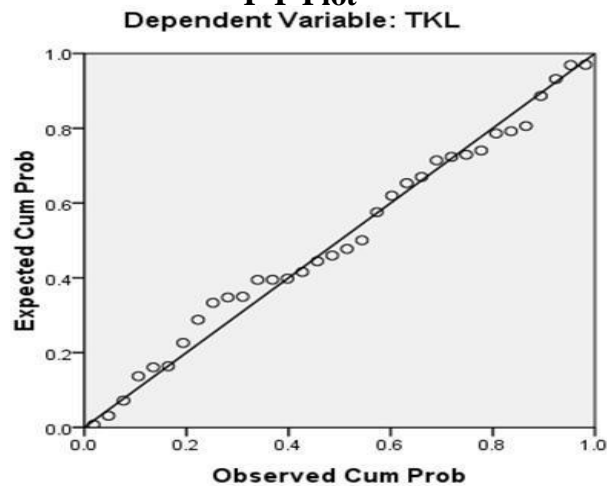
membentuk satu garis lurus diagonal maka distribusi data adalah normal. Berikut adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan diagram.

**Gambar 2**  
**Histogram**



*Sumber : Data diolah SPSS, 2018*

**Gambar 3**  
**P-P Plot**



*Sumber : Data diolah SPSS, 2018*

Pada tampilan grafik histogram terlihat bahwa grafik memberikan pola distribusi normal. Sedangkan pada grafik normal P-Plot menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik telah mendekati sumbu diagonalnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual telah terdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali,2006). Multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai *cutoff*

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali,2006).

**Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas**

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KSDM	.967	1.035
	PAI	.967	1.035

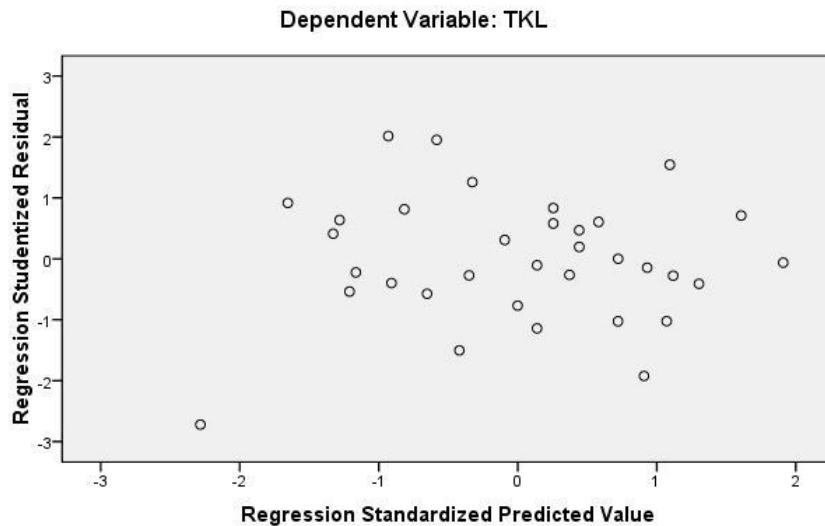
*Sumber: Data diolah SPSS, 2018*

Berdasarkan Tabel 11 yang merupakan hasil multikolinearitas, dapat dilihat besaran nilai *tolerance* dari masing -masing variabel independennya yang didapatkan yaitu 0,967 yang berarti lebih besar dari 0,1 dan VIF (*variance inflation factor*) masing – masing variabel sebesar 1,035 atau lebih kecil dari 10, maka dari hasil nilai *tolerance* dan VIF, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas didalam model regresi penelitian ini.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya dan melihat ada tidaknya pola nilai tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang. Melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2006).

**Gambar 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Berdasarkan Gambar 4 yang merupakan hasil uji heteroskedastisitas, dapat dilihat titik – titik pada grafik *scatterplot* tidak terjadi pengumpulan atau membentuk suatu pola tertentu melainkan hasil yang terjadi adalah terlihat pola titik – titiknya menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini.

### Hasil Uji Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *adjusted R square*-nya.

**Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.572 <sup>a</sup>	.327	.284	4.02559

a. Predictors: (Constant), TPAI, TKSDM

b. Dependent Variable: TKL

Sumber: Data diolah SPSS, 2018

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan diatas menunjukkan tingkat pengaruh kedua variabel independen yaitu kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen adalah sebesar 32,7% dan sisanya 68,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar kedua variabel independen dalam penelitian ini. Angka tersebut dapat dilihat dari Tabel 12 dimana *adjusted R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0.327 atau 32,7%.

### Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara individual atau parsial terhadap variabel dependen, dimana dalam penelitian ini variabel independennya terdiri dari kapasitas sumber daya manusia dan peran auditor internal, sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan.

**Tabel 13. Hasil Parsial (Uji t)**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta		
1 . (Constant)	4.335	9.362		.463	.647
TKSDM	.571	.159	.539	3.598	.001
TPAI	.127	.162	.117	.783	.439

a. Dependent Variable: TKL

Sumber: *Sumber: Data diolah SPSS, 2018*

Berdasarkan Tabel 13 yang merupakan hasil uji parsial (uji t) dapat disimpulkan untuk pengujian hipotesis:

#### 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.12 membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel kapasitas sumber daya manusia ( $X_1$ ) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Pemerintah Kabupaten Waropen memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar  $3,598 > 1.661$  dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,001

$< 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpullkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia ( $X_1$ ) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ ) pada penelitian ini **diterima**.

#### 2. Peran Auditor Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.12 membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel peran auditor internal ( $X_2$ ) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Pemerintah Kabupaten Waropen memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar  $0,783 < 1.661$  dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu  $0,439 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpullkan bahwa variable peran auditor internal ( $X_2$ ) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ ) pada penelitian ini **ditolak**.

#### 3. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji F membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel kapasitas sumber daya manusia ( $X_1$ ) dan peran audit internal ( $x_2$ ) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Pemerintah Kabupaten Waropen memiliki nilai F hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar  $7,547 > 1.661$  dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yaitu

0,002 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia dan peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

## **PEMBAHASAN**

### **Kapasitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen . Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Septiana (2017) yang menyatakan bahwa semakin baik kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki SKPD, maka semakin baik pula kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya bukti bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini diharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih dapat meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya pada pegawai di OPD-OPD yang bekerja pada bagian keuangan dan akuntansi. Peningkatan kompetensi bisa dilakukan dengan pemberian pelatihan-pelatihan, menempatkan pegawai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya, dan pengadaan fasilitas yang memadai agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas sehingga bisa memperoleh opini WTP dari BPK.

Berdasarkan opini audit dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dari tahun 2012-2016 bahwa Kabupaten Waropen berturut-turut menghasilkan opini Tidak Memberi Pendapat. Hal ini juga dikaitkan dengan fakta dilapangan yang sumber daya manusianya belum optimal dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu kurangnya latar belakang pendidikan pegawai yang secara keseluruhan bukan berasal dari bidang pendidikan akuntansi. Secara umum, dalam penyusunan laporan keuangan masih ada keterlibatan pihak konsultan keuangan agar laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu unsur penting dalam menyusun laporan keuangan.

### **Peran Auditor Internal Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Waropen. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiana (2017) yang menyimpulkan bahwa aktif/tidaknya peran audit internal dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut fenomena yang terjadi pada pemerintahan daerah bahwa adakalanya hasil audit yang dibuat oleh auditor internal akan mengarah pada rekomendasi atas temuan-temuan audit agar temuan tersebut diperbaiki dan dilaksanakan sesuai rekomendasi yang dibuat. Namun pihak yang diaudit kurang memberikan respon yang cepat dan tepat atas rekomendasi tersebut. Sehingga adanya pemeriksaan dari auditor internal menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa. Selain itu auditor internal kurang punya power karena auditor internal berasal dari dalam instansi atau organisasi sehingga temuan-temuan yang ada masih terdapat intervensi dan kurang direspon dari lingkungan kerja.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Walikota. Namun karena keterbatasan

kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2014) bahwa sebuah pernyataan mengenai pengertian audit internal yang diungkapkan Institute of Internal Auditor yaitu audit internal merupakan aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah terhadap organisasi dan meningkatkan operasi organisasi. Namun pada penelitian ini, tidak terbukti bahwa peran audit internal (inspektorat) memberikan nilai tambah kepada sebuah organisasi, karena hasil dari penelitian ini peran inspektorat selaku audit internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan peran auditor internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen. Kapasitas SDM sangat penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah juga melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota kepada pihak-pihak terkait sebagaimana dinyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Reviu merupakan salah satu dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP, dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada kepala daerah sehubungan dengan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu bagaimana organisasi perangkat daerah yang ada memenuhi dan menjalankan tanggung jawab atas dana yang diserahkan, apakah telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai peraturan dan ketentuan yang ada, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa mendatang. Agar informasi yang diberikan dapat

memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, maka diperlukan revidi atas laporan keuangan yang merupakan sumber informasi utama kinerja keuangan.

## **PENUTUP 5.1**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang pengaruh keadilan organisasi dan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura dapat disimpulkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen, dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan Peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen, dengan nilai signifikansi sebesar 0,493.

### **Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Waropen ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian yang akan datang. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Adjusted R Square dalam penelitian ini tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 28,4%, dan penelitian ini dilakukan hanya pada salah satu wilayah di Papua, yaitu Kabupaten Waropen serta kurangnya responden pada penelitian ini.

### **Saran**

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah karena adjusted R Square dalam penelitian ini tergolong rendah, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat memakai model penelitian lain, seperti menggunakan variabel intervening, variabel moderating, atau variabel kontrol. Dan mengganti variabel independen lain yang mungkin lebih mempengaruhi kualitas laporan keuangan serta dapat memperluas daerah penelitian, tidak hanya meneliti pada satu tempat saja.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adriana Dkk. 2010. Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.12, No. 1, Maret 2010: 42-55.
- Aliyah, Siti dan Nahar, Aida. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Vol. 8, No. 2, Halaman 97-189.
- Amin, Widjaja Tunggal. 2005. *Internal Auditing*, Edisi Lima. Yogyakarta: BPFE.
- Amir, Amri. 2007. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia” (online), (<http://amriamir.wordpress.com>, diakses tanggal 14 Desember 2017
- Anatan, Lina dan Ellitan, Lena. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Modern*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyadi Wijaya. (2012). *Pendidikan Matematika Realistik, Suatu Alternatif Pendekatan Pembelajaran Matematika* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Astuti, Dewi S.P. 2010. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 8, No. 1, April 2010 :1–9.
- Boynton, Johnson, dan Kell. 2003. *Modern Auditing Jilid 1*, alih bahasa oleh Paul A. Rajoe dan Ichsan Setyo Budi, Edisi 7. Jakarta: Erlangga.
- Darmawi, Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi Astuti. 2007. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 20. Semarang: Badan Penerbit – Universitas Diponegoro.
- Hullah, R, Abdurrahman., dkk. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- I Gustu Ketut Purnaya. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Indra, Bastian. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Nor, Mohd Nazli Mohd, Malcolm Smith and Zubaidah Ismail. 2009. *Auditors’ Perception Of Time Budget Pressure and Reduced Audit Quality Practice: A Preliminary Study from Malaysian Context*. Article.
- Priantinah, Denies dan Adhisty, Megasari. 2012. Persepsi Karyawan Tentang Peran Auditor Internal Sebagai Pengawas, Konsultan dan Katalisator dalam Pencapaian Tujuan Perusahaan. *Jurnal Nominal/Volume I Nomor I/Tahun 2012*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Rafika Aditama, Bandung
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.
- Suroso. 2009. Kedudukan dan Fungsi Audit Internal dalam Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Abadi Ilmu*. Vol. 2 No.2: Hal. 230.
- Widarsono. 2007. Pengaruh Kualitas Informasi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial (Survey pada perusahaan go-publik di Jawa Barat), *Jurnal Akuntansi FE Unsil*, Vol. 2, No. 2, 2007 ISSN : 1907 – 9958.